



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 84 TAHUN 2022  
TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN  
MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023.**

- KESATU** : Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Dalam keadaan tertentu, penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang tidak tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, dimungkinkan penyusunannya sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KETIGA** : Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, harus dilengkapi dengan kajian teknis dan mendapatkan izin prakarsa dari Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani  
secara elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 84 TAHUN 2022  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI  
DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN  
2023

MATRIX PROGRAM PENYUSUNAN  
PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Tata Cara Penetapan Sentra Ekonomi Garam Rakyat	Mengatur Kriteria tentang lokasi yang bisa ditetapkan sebagai Sentra Ekonomi Garam Rakyat													Tindak lanjut Pasal 5 ayat (3) Perpres Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
2.	Peraturan Menteri	Pelaksanaan Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam	Tata Cara Pengangkatan dan pengangkutan BMKT													Tindak lanjut Ranperpres Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam.
3.	Peraturan Menteri	Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah	1. Peran Serta Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan													Tindak lanjut dari Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<p>pengawasan PWP-3-K; dan</p> <p>2. Pemberdayaan masyarakat dalam PWP-3-K.</p>													tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
4.	Peraturan Menteri	Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan	<p>1. Syarat Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan;</p> <p>2. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi oleh Instansi Pembina;</p> <p>3. Tahapan pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan;</p> <p>4. Hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis</p>													Tindak lanjut dari Pasal 56 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan.

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			Pengusahaan Jasa Kelautan.													
5.	Peraturan Menteri	Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	1. Syarat Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; 2. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi oleh Instansi Pembina; 3. Tahapan pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; dan 4. Hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.													Tindak lanjut dari Pasal 54 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.
6.	Peraturan Menteri	Standar Infrastruktur Pengelolaan Kawasan Konservasi	1. Standar infrastruktur pengelolaan, meliputi: a. infrastruktur untuk kepentingan SUOP;													Tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. infrastruktur pariwisata; dan</li> <li>c. infrastruktur perikanan.</li> </ul> <p>2. Standar pengelolaan perikanan berkelanjutan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. area budidaya;</li> <li>b. sertifikasi; dan</li> <li>c. daya dukung.</li> </ul> <p>3. Standar pengelolaan pariwisata alam perairan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. lokasi kegiatan;</li> <li>b. sertifikasi; dan</li> <li>c. daya dukung.</li> </ul>													Nasional Tahun 2018-2025: a. Program I: Penyusunan Kebijakan dan Regulasi terkait Pengelolaan Kawasan Konservasi; b. Kegiatan I: Penyusunan regulasi tentang standar infrastruktur pengelolaan kawasan konservasi per lokasi/wilayah; c. Sasaran I: Standardisasi infrastruktur pengelolaan kawasan konservasi; d. Target/Output I: 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP).
7.	Peraturan Menteri	Penatausahaan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan pulau-pulau kecil;</li> <li>2. Tata cara penerbitan izin dan rekomendasi;</li> </ul>													Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMENKP/2020 tentang Perubahan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			3. Masa berlaku dan berakhirnya izin dan rekomendasi; 4. Pengawasan; dan 5. Sanksi administratif.													atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMENKP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di Bawah 100 Km <sup>2</sup> (Seratus Kilometer Persegi).
8.	Keputusan Menteri	Besaran Target Indikator Kinerja Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional	1. Produksi garam pada SEGAR; 2. Kualitas garam pada SEGAR; dan 3. Penyerapan hasil produksi garam pada SEGAR.													Tindak lanjut Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
9.	Keputusan Menteri	Sentra Ekonomi Garam Rakyat	Menetapkan lokasi Sentra Ekonomi Garam Rakyat													Tindak lanjut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
10.	Keputusan Menteri	Penetapan Kawasan Konservasi	1. Penetapan kategori kawasan; 2. Penetapan zona; 3. Batas koordinat; dan 4. Peta.													Komulatif terbuka tindak lanjut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
11.	Keputusan Menteri	Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan yang Terancam Punah	Penetapan Jenis Ikan yang Terancam Punah													Kumulatif terbuka Tindak lanjut Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.
12.	Keputusan Menteri	Penetapan Rencana Aksi Nasional Jenis Ikan Terancam Punah dan/atau Dilindungi	1. Strategi; 2. Aksi; 3. Indikator; 4. Output; 5. Lokasi prioritas; 6. Tahun; dan 7. Penanggung jawab unit kerja terkait.													Kumulatif terbuka Rencana aksi pelestarian dari Jenis Ikan Terancam Punah dan/atau Dilindungi.
13.	Keputusan Menteri	Rencana Aksi Bulan Cinta Laut	1. Gerakan peningkatan kesadaran; 2. Pengelolaan sampah pada kegiatan kelautan dan perikanan;													1. Setiap strategi berisi program dan rencana aksi; 2. Mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			3. Penanggulangan sampah di pesisir dan laut; dan 4. Mekanisme penguatan pengawasan dan/atau penegakan hukum serta kelembagaan.													2018 Tentang Penanganan Sampah Laut.

2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan	1. Perubahan selektivitas dan kapasitas Alat Penangkapan Ikan; dan 2. Pengaturan Alat Penangkapan Ikan baru.													
2.	Peraturan Menteri	Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMENKP/2016 tentang Tata Cara Penetapan Faktor X														

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		7/PERMENKP/2016 tentang Tata Cara Penetapan Faktor X Tarif Jasa Pengadaan Es di Pelabuhan Perikanan	Tarif Jasa Pengadaan Es di Pelabuhan Perikanan.													
3.	Keputusan Menteri	Rencana Pengelolaan Perikanan	1. Pendahuluan; 2. Status perikanan terkini; dan 3. Rencana strategis pengelolaan perikanan.													
4.	Keputusan Menteri	Penetapan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan	Batas Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan dan Peta Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan.													

### 3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Sistem Perbenihan Nasional	1. Pengelolaan sumber daya genetik ikan; 2. Perakitan varietas ikan unggul; 3. Pengelolaan logistik perbenihan; dan 4. Kelembagaan perbenihan.													Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
2.	Peraturan Menteri	Cara Pemberian Ikan yang Baik dan Cara Budidaya Ikan yang Baik	Penyesuaian mekanisme perizinan berusaha.												
3.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2019 tentang Obat Ikan	Penyesuaian mekanisme perizinan berusaha.												
4.	Peraturan Menteri	Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan	Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan.												
5.	Peraturan Menteri	Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan	Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.												

4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan SNI Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng secara Wajib	a. Perubahan Nomor pemberlakuan SNI; dan b. Perubahan jenis ikan.													Menindaklanjuti hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan penggabungan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan SNI Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng secara Wajib, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2019 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib dan Peraturan Menteri

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
																Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib.
2.	Peraturan Menteri	Kemitraan Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan	1. Penyesuaian Ruang Lingkup Pengaturan Bidang Usaha dengan penanaman modal (usaha besar) yang wajib bermitra dengan koperasi dan UMKM sektor kelautan dan perikanan 2. Penambahan Jenis bidang usaha baru pada sektor KP yang wajib bermitra dengan Koperasi dan UMKM yaitu usaha produksi/ekstraksi garam) Penyesuaian prinsip dan pola kemitraan usaha;													Menyempurnakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2019 tentang Kemitraan pada Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Sektor Kelautan dan Perikanan.

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			3. Tahapan pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dengan koperasi dan UMKM; 4. Pembatasan kewenangan KKP pada monitoring kemitraan usaha; dan 5. Penyesuaian Isi Perjanjian antara usaha besar dengan koperasi atau UMKM yang bermitra.													
3.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan	Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, seperti: 1. batasan/plafon tertinggi yang dapat diterima calon penerima KUR pada masing-masing jenis Kredit Usaha Rakyat dan persyaratan calon penerima Kredit Usaha Rakyat; dan 2. skema Kredit Usaha Rakyat.													Menyesuaikan Peraturan Menteri Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
4.	Peraturan Menteri	Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2016 tentang Skala Usaha Pengolahan ikan.	Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2016 tentang Skala Usaha Pengolahan ikan.													
5.	Peraturan Menteri	Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.	1. Pangkat, golongan ruang dan pengangkatan dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan; 2. Target Kinerja dan Angka Kredit Minimal; 3. Pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit; 4. Kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan; dan 5. Pemberhentian dari jabatan dan penangkatan kembali.													Tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.
6.	Peraturan Menteri	Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;	1. Standar kualitas hasil kerja Analis Pasar Hasil Perikanan; 2. Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja;													Tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			3. Penilaian Angka Kredit; dan 4. Hasil Kerja Minimal.													tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.
7.	Peraturan Menteri	Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan	1. Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan yang dapat mempertahankan mutu dan keamanan Hasil Perikanan a. Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan dengan penerapan Distribusi Ikan yang Baik; dan b. Kriteria Pelaku usaha yang diwajibkan untuk menerapkan Distribusi Ikan yang Baik. 2. Penerapan Distribusi Ikan yang Baik: a. Pemenuhan penerapan Tempat/Fasilitas; b. Pemenuhan penerapan Persyaratan Operasi; c. Pemenuhan penerapan Kebersihan/Sanitasi Personil; dan													Tindak lanjut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional.

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			d. Pemenuhan penerapan Pengendalian Hama. 3. Penilaian Distribusi Ikan yang Baik, pengaturan dan mekanisme Penilaian terhadap pemenuhan penerapan Distribusi Ikan yang Baik; dan 4. Pengawasan Distribusi Ikan yang Baik, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban, ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam penerapan Distribusi Ikan yang Baik.													

5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan	1. Penyusunan kebutuhan; 2. Perhitungan kebutuhan; dan 3. Hal lain yang terkait dengan kegiatan unsur kegiatan yang ada pada penyusunan dan													Tindak lanjut Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Jabatan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.													Fungsional Pengawas Perikanan.
2.	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Perikanan	1. Penyusunan kebutuhan; 2. Perhitungan kebutuhan; dan 3. Hal lain yang terkait dengan kegiatan unsur kegiatan yang ada pada penyusunan dan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Perikanan.													Tindak lanjut Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Perikanan.
3.	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan	1. Penyusunan kebutuhan; 2. Perhitungan kebutuhan; dan 3. Hal lain yang terkait dengan kegiatan unsur kegiatan yang ada pada penyusunan dan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan.													Tindak lanjut Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Perikanan.
4.	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang	1. Penyusunan kebutuhan;													Tindak lanjut Pasal 46 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan	2. Perhitungan kebutuhan; dan 3. Hal lain yang terkait dengan kegiatan unsur kegiatan yang ada pada penyusunan dan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.													Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan.
5.	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian	1. Mekanisme Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Perikanan melalui penyesuaian; dan 2. Persyaratan untuk diangkat sebagai pejabat fungsional Asisten Pengawas Kelautan melalui penyesuaian.													Tindak lanjut Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan.
6.	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian	1. Mekanisme Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan melalui penyesuaian; dan 2. Persyaratan untuk diangkat sebagai pejabat fungsional													Tindak lanjut Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			Pengawas kelautan melalui penyesuaian.													

#### 6. Inspektorat Jenderal

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	-	-	-													-

#### 7. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia	Mengatur kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi tenaga industri.													Tindak lanjut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2.	Peraturan Menteri	Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluhan Perikanan	1. Pangkat, golongan ruang, pengangkatan; 2. Target kinerja dan angka kredit minimal; 3. Pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit; 4. Kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan; dan 5. Pemberhentian dari jabatan dan pengangkatan Kembali.													Tindak lanjut Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan Perikanan.

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
3.	Peraturan Menteri	Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Penyuluhan Perikanan	1. Pangkat, golongan ruang, pengangkatan; 2. Target kinerja dan angka kredit minimal; 3. Pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit; 4. Kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan; dan 5. Pemberhentian dari jabatan dan pengangkatan Kembali.													Tindak lanjut Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluhan Perikanan.
4.	Peraturan Menteri	Pedoman Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluhan Perikanan	1. Jenis output, standar kemampuan rata-rata, dan kontribusi; 2. Kualifikasi pendidikan; 3. Perhitungan kebutuhan; dan 4. Pengusulan kebutuhan.													Tindak lanjut Pasal 51 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluhan Perikanan.
5.	Peraturan Menteri	Pedoman Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluhan Perikanan	1. Jenis output, standar kemampuan rata-rata, dan kontribusi; 2. Kualifikasi pendidikan; 3. Perhitungan kebutuhan; dan													Tindak lanjut Pasal 51 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			4. Pengusulan kebutuhan.													tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluhan Perikanan.
6.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan	1. Perubahan penetapan keanggotaan Sekretariat Komnas KAJISKAN; 2. Kedudukan Sekretariat Komnas KAJISKAN; 3. Mekanisme Penggantian dan/atau Perubahan anggota Komnas KAJISKAN; dan 4. Sumber pendanaan.													Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

#### 8. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	1. Golongan ruang, pengangkatan dan jabatan fungsional; 2. Target dan angka kredit kerja minimal 3. Pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit; 4. Kenaikan pangkat dan jabatan; 5. Pemberhentian jabatan dan													Tindak lanjut Pasal 52 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Jabfung Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			pengangkatan kembali; dan 6. Hal lain yang berkaitan dengan kegiatan dalam pelaksanaan dan teknis pada Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.													
2.	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	1. Golongan ruang, pengangkatan dan jabatan fungsional; 2. Target dan angka kredit kerja minimal 3. Pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit; 4. Kenaikan pangkat dan jabatan; 5. Pemberhentian jabatan dan pengangkatan kembali; dan 6. Hal lain yang berkaitan dengan kegiatan dalam pelaksanaan dan teknis pada Jabatan Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.													Tindak lanjut Pasal 52 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Jabfung Teknisi Pengendali Hama Penyakit Ikan.

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
3.	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	1. Penyusunan kebutuhan; 2. Perhitungan kebutuhan; dan 3. Hal lain yang terkait dengan kegiatan unsur kegiatan yang ada pada penyusunan dan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.													Tindak lanjut Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.
4.	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	1. Penyusunan kebutuhan; 2. Perhitungan kebutuhan; dan 3. Hal lain yang terkait dengan kegiatan unsur kegiatan yang ada pada penyusunan dan perhitungan kebutuhan pada Jabatan Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.													Tindak lanjut Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.
5.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang	1. Ruang lingkup peraturan mencakup: a. Penjaminan Mutu ( <i>Quality Assurance</i> )						■							

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
		Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan	b. Pengendalian Mutu c. Pembinaan Mutu d. Operasional Otoritas Kompeten  2. Tugas dan kewenangan setiap unit yang terkait dalam penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.												
6.	Peraturan Menteri	Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan	1. Standar Kualitas Hasil Kerja; 2. Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja; 3. Penilaian Angka Kredit; dan 4. Hasil Kerja Minimal.												
7.	Peraturan Menteri	Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan	1. Standar Kualitas Hasil Kerja; 2. Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja; 3. Penilaian Angka Kredit; dan 4. Hasil Kerja Minimal.												

9. Biro Perencanaan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Penugasan Sebagaimana Urusan Pemerintahan dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan	1. Dasar Pelimpahan Urusan; 2. Karakteristik urusan yang dilimpahkan dan/atau ditugaskan; 3. Nama program dan kegiatan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka Dekonsentrasi; 4. Nama program dan kegiatan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Tugas Pembantuan; 5. Penetapan dan Persyaratan pejabat pengelola anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan 6. Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan dan mekanisme laporan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.												
2.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	Pedoman Pengelolaan Hibah Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		23/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	(perencanaan dan pelaksanaan).													
3.	Peraturan Menteri	Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Perencanaan Kinerja; 2. Pengukuran Kinerja; 3. Pelaporan Kinerja; 4. Evaluasi Kinerja; dan 5. Sistem Aplikasi Kinerja.													
4.	Peraturan Menteri	Pedoman Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Implementasi 7 (tujuh) prasyarat pengarusutamaan gender di Kementerian; dan 2. Pelaporan implementasi pengarusutamaan gender di Kementerian.													
5.	Keputusan Menteri	Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023	Menetapkan indikator kinerja utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
6.	Keputusan Menteri	Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	1. Arah kebijakan, sasaran strategi, program (sasaran program, indikator sasaran program, output program, dan indikator output program), dan kegiatan (sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan), serta terkait dukungan terhadap prioritas nasional, major project, kegiatan tematik, dan terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024; 2. Matriks Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024; dan 3. Rincian komponen kegiatan utama dan dukungan pada terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024.													

10. Biro Keuangan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Penambahan Jenis Bantuan Pemerintah dengan karakteristik tertentu; 2. Perubahan masa Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah; 3. Perubahan Kriteria Penerima Bantuan Pemerintah; 4. Perubahan bentuk pemberian Bantuan Pemerintah; dan 5. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional.													Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
2.	Peraturan Menteri	Optimalisasi Penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Penggunaan Bersama Barang Milik Negara antarKuasa Pengguna Barang dalam lingkup Eselon I yang sama; 2. Penggunaan Bersama Barang Milik Negara antarKuasa Pengguna Barang dalam lingkup Eselon I yang berbeda; 3. Penggunaan Bersama Barang													Dalam rangka melaksanakan wewenang dan Tanggung jawab Menteri sebagai Pengguna Barang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 hal Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara serta untuk mewujudkan tertib fisik, administrasi dan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			Milik Negara yang ditatausahakan oleh Kuasa Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang-Badan Layanan Umum; 4. Pengalihan Penggunaan Barang Milik Negara antarKuasa Pengguna Barang dalam lingkup Eselon I yang sama; 5. Pengalihan Penggunaan Barang Milik Negara antarKuasa Pengguna Barang dalam lingkup Eselon I yang berbeda; dan 6. Pengalihan Penggunaan Barang Milik Negara dari Kuasa Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang-BL.													hukum dalam pengelolaan BMN dipandang perlu disusun aturan tentang penggunaan BMN di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3.	Peraturan Menteri	Pedoman Penatausahaan Persediaan lingkungan Kementerian	di	1. Pejabat pengurus persediaan; 2. Penyimpanan persediaan;												Tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Kelautan dan Perikanan.	3. Pengamanan dan pemeliharaan persediaan; 4. Pendistribusian Persediaan; dan 5. Penghapusan persediaan.													Perikanan Nomor 10b/LHP/XVII/05/ 2022 tentang Persediaan serta mewujudkan terciptanya tertib administrasi, fisik dan hukum dalam rangka pengelolaan BMN dipandang perlu menerbitkan aturan Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### 11. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan	Mengatur mengenai organisasi dan tata kerja unit organisasi pusat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.													Tindak lanjut Peraturan Presiden mengenai Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Mengatur mengenai organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.													Tindak lanjut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
3.	Peraturan Menteri	Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Mengatur mengenai jenis jabatan Aparatur Sipil Negara dan besaran kelas jabatan masing-masing Aparatur Sipil Negara.													Penyesuaian terhadap hasil evaluasi jabatan struktural, jabatan fungsional, dan pelaksana di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4.	Peraturan Menteri	Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan	Mengatur mengenai tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan serta hubungan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan organisasi profesi.													Pengaturan terhadap tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional dan hubungan kerjanya dengan Instansi Pembina, organisasi profesi wajib dibentuk dan difasilitasi oleh Instansi Pembina, oleh sebab itu perlu diatur tata cara pembentukannya.
5.	Peraturan Menteri	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Uji Kompetensi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Mengatur pelaksanaan penilaian kompetensi dan uji kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan.													Tindak lanjut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
6.	Keputusan Menteri	Pendelegasian Wewenang dalam Penandatanganan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Mengatur mengenai pendelegasian wewenang kepada pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menandatangani Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur.													Penyesuaian terhadap Kewenangan Penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan bidang sumber daya manusia aparatur.

12. Biro Hukum

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Keputusan Menteri	Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	Menetapkan program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.													

13. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-	1. Informasi Publik; 2. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik;													Menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP	3. PPID di Lingkungan Kementerian; 4. Pengklasifikasian Informasi Publik; 5. Pelayanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian dan Perangkat PPID Kementerian; 6. Pengelolaan Layanan Informasi Melalui Sistem Informasi PPID; 7. Sengket Informasi Publik; dan 8. Pelaporan.													Standar Layanan Informasi Publik.

14. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	-	-	-													-

15. Pusat Data, Statistik, dan Informasi

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Pelayanan Terpadu Satu Atap	1. Ketentuan umum; 2. Layanan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA); 3. Penyelenggara dan Jadwal Operasional PTSA; 4. Fasilitas PTSA; 5. Manajemen Pelayanan PTSA;													Tindak lanjut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			6. Hak dan Kewajiban PTSA; 7. Hak dan Kewajiban bagi Pengguna Layanan; 8. Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi; 9. Pengembangan PTSA; 10. Jenis Layanan di PTSA Pusat dan PTSA Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan 11. Mekanisme Pembentukan PTSA UPT.													
2.	Peraturan Menteri	Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2018 tentang Master Plan Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022	Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2018 tentang Master Plan Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022.													
3.	Keputusan Menteri	Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Penyusunan Arsiterktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengacu pada Rencana Strategis KKP dan													Tindak lanjut Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			<p>ketentuan mengenai Rencana Induk SPBE Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan</p> <p>2. Penerapan prinsip Arsiterktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.</p>													Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4.	Keputusan Menteri	Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Kelautan dan Perikanan	<p>1. Penyusunan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik mengacu terhadap Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan</p> <p>2. Prinsip peta rancana sistem pemerintahan berbasis elektronik selaras dengan</p>													Tindak lanjut Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.													
5.	Keputusan Menteri	Data Induk	1. Penyusunan basis data (format, <i>field</i> , dan kontek); 2. Nomenklatur (konten dan jumlah <i>record</i> ); dan 3. Kemudahan integrasi, sinkronisasi, rekonsiliasi, dan penelusuran data dari berbagai system aplikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.													Tindak lanjut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.
6.	Keputusan Menteri	Rencana Aksi Satu Data Kelautan dan Perikanan	1. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten; 2. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia; 3. kegiatan terkait pengumpulan Data; 4. kegiatan terkait pemeriksaan Data;													Tindak lanjut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			5. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau 6. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.													

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani  
secara elektronik

Efin Martiana

<https://jdih.kkp.go.id/>